

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sabila Damariesta

NPP. 30.0757

Asdaf Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: damariesta78@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Anwar Rosshad, SH, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Indonesia still maintains the preservation of one of the cultures with the existence of traditional markets. Traditional markets have various problems that are quite complex and complicated so that the government issued a policy with the traditional market revitalization program which is a sustainable program every year and has been carried out by the Government of Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta from 2012 until now. This research is entitled "Policy Implementation of Traditional Market Revitalization Program in Kapanewon Prambanan, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region Province". **Purpose:** to determine the problems faced in the process of implementing the traditional market revitalization program policy in Kapanewon Prambanan carried out by the Department of Industry and Trade of Sleman Regency. **Method:** this study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation with data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and conclusions. The theory used in this study is Edward III's policy implementation theory which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. **Result:** The revitalization carried out in Kapanewon Prambanan went well and consistently, but there were still obstacles when the revitalization process took place in communication, resources, and disposition indicators. **Conclusion:** The existence of these obstacles the government has made several efforts to overcome them. The advice given by the author to the Sleman Regency Industry and Trade Office to be a future evaluation in making policies requires very careful and detailed planning before the program is carried out by communicating and coordinating by the actors concerned. So as to minimize the obstacles currently experienced by considering the strategies and policies that have been formed. In addition, the government needs to pay attention to the potential that exists around the market.

Keywords: Policy Implementation, Revitalization, Traditional Markets

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Indonesia masih menjaga kelestarian salah satu budaya dengan adanya pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki berbagai permasalahan yang cukup kompleks dan rumit sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan adanya program revitalisasi pasar tradisional yang menjadi program berkelanjutan tiap tahun dan telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2012 hingga saat ini. Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kapanewon

Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kapanewon Prambanan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. **Hasil/Temuan:** Revitalisasi yang dilaksanakan di Kapanewon Prambanan berjalan dengan baik dan konsisten, namun masih ditemukan kendala saat proses revitalisasi berlangsung pada indikator komunikasi, sumber daya, dan disposisi. **Kesimpulan:** Adanya hambatan tersebut pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya. Saran yang diberikan oleh penulis untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman untuk menjadi evaluasi kedepan dalam mengambil kebijakan perlu perencanaan yang sangat matang dan mendetail sebelum program tersebut dijalankan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi oleh para aktor yang bersangkutan. Sehingga dapat meminimalisir hambatan yang saat ini dialami dengan mempertimbangkan strategi dan kebijakan yang telah dibentuk. Selain itu pemerintah perlu memperhatikan potensi yang ada di sekitar pasar.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Revitalisasi, Pasar Tradisional

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang masih menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, terutama pada aspek perekonomian baik dalam skala makro ataupun mikro. Pertumbuhan ekonomi yang sangat dinamis dari tahun ke tahun menjadi tantangan bagi pemerintah untuk selalu membuat inovasi yang akan menghasilkan suatu kebijakan. Instansi pemerintah yang menangani pengelolaan pasar-pasar dituntut untuk berperan aktif dalam mempromosikan, meningkatkan manajemen, membantu pemasaran, dan mengembangkan fisik pasar. Menurut Danisworo (2002), revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali area atau bagian kota yang dahulu ramai, tetapi sekarang mengalami penurunan kualitas akibat kemajuan zaman. Indonesia telah membuat program dalam pengembangan pasar tradisional dengan cara merevitalisasi dengan merekonstruksi ulang pasar-pasar menjadi lebih nyaman dan baik secara fisik maupun nonfisik. Namun dalam pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional, pemerintah memiliki tantangan tersendiri dengan banyaknya pasar modern yang sekarang lebih banyak berdiri dibandingkan pasar tradisional. Penataan lokasi pendirian pasar modern yang saling berdekatan dengan pasar tradisional dengan jarak kurang dari 1 (satu) kilometer menjadi masalah tersendiri bagi pedagang di pasar tradisional. Sudah semestinya bagi para pelaku usaha untuk menaati aturan yang telah dibuat pemerintah Kabupaten Sleman dengan tertib. Sebuah peraturan daerah dibuat dengan tujuan agar suatu usaha dapat berkembang secara legal dan mendapat perlindungan hukum.

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengimplementasikan program revitalisasi pasar sejak tahun 2016. Diatur dengan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang selanjutnya diatur kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten yang menyebutkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan pasar dilakukan sedemikian rupa sehingga kegiatan ekonomi rakyat mampu bersaing dengan pembangunan ekonomi modern untuk menciptakan keseimbangan pasar di daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas ditemukan beberapa masalah yang memiliki keterkaitan dengan fokus yang akan diteliti mengenai revitalisasi pasar. implementasi program revitaliasi pasar di Kabupaten Sleman belum efektif disebabkan masih ditemukan manajemen pasar yang belum tertata sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Marak pendirian tempat usaha berjarak kurang dari 1 kilometer sehingga melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pembangunan pada sektor perdagangan tidak merata terutama pada pasar tradisional, sehingga pemerintah melakukan kebijakan program revitalisasi guna meningkatkan perekonomian pasar tradisional.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian terdahulu, yaitu Nanda Mutia Baroroh dengan judul Implementasi Kebijakan Program Revitaliasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo dengan hasil program berjalan sukses adanya kerja sama yang erat dari pihak terlibat (Nanda,2020). Penelitian Silitonga dan Mulyadi menemukan bahwa setelah pasar pulih, dampak ekonominya termasuk penurunan penjualan dan pendapatan pedagang, serta peningkatan jumlah tenaga kerja di pasar. Faktor-faktor seperti komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, pengaturan yang efektif, dan struktur birokrasi yang mendukung turut berkontribusi pada keberhasilan revitalisasi Pasar Tanggul, meskipun ada protes dari masyarakat sekitar sebagai hambatan (Silitongan & Mulyadi 2021). Penelitian Ariani dan Sumbawa menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Nyanggelan di Pemerintah Kota Denpasar mencakup komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, struktur birokrasi yang baik, disposisi, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, serta respon masyarakat dan hambatan yang dihadapi dalam revitalisasi Pasar Nyanggelan adalah tumbuhnya pasar modern dan toko berjejaring di wilayah Desa/Kelurahan dan kendala pada sumber daya. (Ariani & Sumbawa, 2017). Penelitian oleh Zakni menemukan bahwa Implementasi di pasar tradisional Kangkung berpengaruh positif terhadap pendapatan para pedagang. Dari sudut pandang ekonomi Islam, revitalisasi tersebut merupakan hal yang positif (Zakni, 2017). Penelitian Mulyati dan Surtiani menemukan bahwa sumber daya yang tersedia untuk revitalisasi pasar Sarijadi tidak memenuhi kebutuhan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun keahlian staf yang ada, terdapat anggaran yang cukup untuk revitalisasi pasar Sarijadi sebesar 5-6M lalu fasilitas yang ada di pasar Sarijadi belum memadai Implementasi kebijakan masih belum jelas karena program kerja yang ada belum memiliki acuan dan belum dituangkan dalam Renstra (Mulyati & Surtiani, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yang mana lokus penelitian yang berbeda dan dalam penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional dengan faktor penghambat, pendukung dan upaya dari pemerintah. Selain itu indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori Edwards III (1980) yang terdiri dari empat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1.5. Tujuan

Merujuk pada permasalahan di atas, maka tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman seperti faktor penghambat dan pendukung sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dapat mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional

II. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini berawal dari fakta yang senyatanya terjadi di lapangan dan menjadi bukti konkrit untuk penulis mendalami permasalahan yang terjadi. Pendekatan yang lebih mendalam dengan metode induktif dimana dalam penelitian tidak sesuai kenyataan lapangan, kemudian peneliti membuat analisis data yang ditemukan, mengajukan pertanyaan, membandingkan fakta, teori, argument dan hukum yang sesuai kemudian ditarik menjadi kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi difokuskan terhadap program revitalisasi pasar tradisional di Kapanewon Prambanan. Wawancara menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling* yang terdiri dari ASN Disperindag dan pedagang. Dokumentasi sebagai data pendukung dalam memperkuat hasil penelitian. Pengolahan data kualitatif diawali dengan mengatur dan menyiapkan data untuk dianalisis, mencari informasi dengan membaca seluruh data, melakukan analisa berdasarkan pendekatan teoritis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edwards III yang terdiri dari 4 variabel yakni komunikasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Komunikasi

Komunikasi menjadi proses yang sangat kompleks dan rumit sehingga perlu adanya koordinasi antara pembuat, pengambil, dan pelaksana kebijakan. Dalam penyampaian informasi terjadi koordinasi yang berlangsung secara internal maupun eksternal. Sosialisasi yang berulang kepada pedagang dapat dipahami namun terjadi kendala dimana ruang relokasi tidak dapat mencakup keseluruhan pedagang. Hal ini agar menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sebelum menerapkan kebijakan dapat menyiapkan beberapa rencana apabila terjadi kendala saat proses berlangsung. Pemerintah Kabupaten Sleman konsisten terhadap kebijakan program revitalisasi dengan adanya peraturan terbaru dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.

3.2. Sumber Daya

Faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dan tujuan keberhasilan dari sebuah kebijakan, sebab tanpa adanya sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai implementasi akan berlangsung lambat. Disperindag Sleman memiliki jumlah staf yang cukup dan sesuai dengan bidangnya dibantu dengan adanya unit pelaksana teknis pelayanan pasar untuk mengatur dan mengurus pasar. Informasi menjadi salah satu sumberdaya dalam pelaksanaan suatu kebijakan dimana isi dari suatu keputusan dapat diketahui publik. Dalam hal ini program revitalisasi pasar tradisional telah tersebar luas melalui pamflet di media sosial maupun website kementerian perdagangan mengenai percepatan program nasional revitalisasi pasar rakyat (2015-2019) hingga tahun ini masih berlanjut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik daerah diharapkan mengambil inisiatif untuk meningkatkan pelayanan pasar Kapanewon Prambanan sehingga posisi pemerintah sebagai penyelenggara layanan pasar bergeser dari “dilayani” menjadi “melayani”. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran pasar. Dukungan fasilitas yang memadai menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan. Dana yang digunakan dalam revitalisasi bangunan utama pasar rakyat menggunakan Dana Alokasi Khusus dengan ketentuan rekomendasi dari dinas urusan pekerjaan umum setempat, meningkatkan nilai aset fisik tanpa mengubah lokasi bangunan, memberikan prioritas kepada pedagang lama dengan menyediakan tanah dari kas desa maupun tanah *sultan ground*. Namun realitanya saat relokasi berlangsung tidak dapat menampung para pedagang sehingga para pedagang tetap di sekitar lokasi pasar yang akan dibangun.

3.3. Disposisi

Disposisi merupakan suatu sikap bagaimana menerima atau menolak keputusan dari kebijakan secara progresif agar dapat terwujud sebagaimana mestinya. Efek disposisi sendiri terdiri dari sikap pelaku dan umpan balik dari pelaku dalam pelaksanaan regulasi revitalisasi pasar tradisional di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman. Selanjutnya pengangkatan birokrasi menjadi peranan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan apabila memahami maksud dan tujuan kebijakan itu dibuat. Personil Disperindag Sleman sebagai pelaksana pada kebijakan program revitalisasi pasar sudah paham mengenai tugas dan tanggung jawab yang diberikan dari atasan sesuai dengan jabatan yang diampu. Seorang pegawai berhak mendapatkan insentif sebagai bentuk penghargaan dari suatu Lembaga atas prestasi yang telah dicapai untuk meningkatkan motivasi pegawai. Dalam hal ini Disperindag Sleman telah memberikan insentif berupa uang lembur, pelatihan peningkatan kerja, dan kenaikan jabatan.

3.4. Struktur Birokrasi

Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi mempunyai 2 karakteristik yaitu SOP dan fragmentasi. SOP harus dipedomani dengan baik dalam proses pelaksanaan kebijakan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan terkhusus masalah keuangan. Fragmentasi pada kegiatan program revitalisasi pasar tradisional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman berjalan dengan baik melalui pola kinerja dan Kerjasama dalam pelaksanaan program. Pihak-pihak yang terkait diantaranya seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, POL PP, Panewu Prambanan, Lurah Bokoharjo, dan ketua paguyuban.

3.5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman

Faktor penghambat dalam penerapan program revitalisasi pasar Prambanan yaitu:

1. Kurangnya kejelasan saat sosialisasi dilakukan

Sosialisasi yang dilakukan dari adanya kebijakan revitalisasi pasar kurang mendapat respon dari para pedagang dikarenakan tempat untuk relokasi tidak mencukupi keseluruhan pedagang dan akses tempat relokasi sulit dijangkau bagi distributor besar

2. Keterbatasan sumber daya

Fasilitas yang diberikan setelah pasar selesai direvitalisasi belum dapat dinikmati secara langsung karena dibutuhkan biaya besar melengkapi sarana prasarana. Untuk dana yang diberikan tidak dapat langsung dicairkan tetapi bertahap.

3. Kurangnya koordinasi antar organisasi

Dalam hal ini pada indikator fragmentasi kurang efektif dimana koordinasi antara Disperindag dengan POL PP tidak sesuai dengan yang diharapkan karena ditemukan pedagang yang tidak tertib saat direlokasi.

3.6. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman

Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan program revitalisasi di Pasar Prambanan, antara lain:

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten

Kebijakan revitalisasi Pasar Prambanan didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaannya. Pasar Prambanan yang saat ini menjadi ikon Kabupaten Sleman di sektor timur dan menjadi wadah mata pencaharian bagi pedagang dari dalam Kabupaten Sleman maupun luar Kabupaten. Dengan adanya kebijakan ini akan mengembalikan hal yang penting dan dapat memberikan hasil dan manfaat yang optimal bagi perekonomian masyarakat.

2. Antusias dan apresiasi dari masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat menginginkan adanya kualitas pelayanan publik yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam proses revitalisasi Pasar Prambanan masyarakat sangat antusias dalam tahapannya mulai dari sosialisasi yang diberikan langsung oleh pihak Disperindag dan saat relokasi pedagang dilaksanakan.

3.7. Upaya

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman untuk meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional yaitu dengan membuat program jangka menengah sebagai berikut:

a. Memberikan undian dasaran, kios, los kepada pedagang lama setelah pasar direvitalisasi

b. Meningkatkan pengelolaan oleh BUMD dengan cara pembebasan tanah, pembangunan fisik, peningkatan kapasitas pedagang dan pengelola pasar

c. Mengupayakan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dengan SKPD terkait agar berjalan sesuai tujuan

3.8. Diskusi Utama Penelitian

Pelaksanaan kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Sleman berjalan dengan baik dan mempunyai dampak yang positif bagi para pedagang. Dalam penelitian penulis masih menemukan adanya hambatan yang mengacu pada teori Edward III pada indikator komunikasi, sumber daya dan fragmentasi. Disperindag sleman memberikan upaya untuk mengatasi hambatan dengan adanya dukungan dari pemerintah dan apresiasi dari masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan Implementasi kebijakan program revitalisasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik dibuktikan dengan konsistensi terhadap program yang selalu dijalankan dari tahun ke tahun di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, Faktor-faktor penghambat diantaranya kejelasan komunikasi yang dilakukan saat sosialisasi kurang mendapat respon dari para pedagang, sumber daya pada indikator fasilitas dikarenakan dana yang cukup besar untuk membuat sarana dan prasarana yang layak saat relokasi maupun setelah revitalisasi, disposisi pada indikator fragmentasi yaitu koordinasi dengan POL PP yang kurang efektif dalam penertiban pedagang. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengatasi hambatan yaitu dengan memberikan undian dasaran, kios, los kepada pedagang lama setelah pasar direvitalisasi, meningkatkan pengelolaan oleh BUMD dengan cara pembebasan tanah, pembangunan fisik, peningkatan kapasitas pedagang dan pengelola pasar, mengupayakan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dengan SKPD terkait agar berjalan sesuai tujuan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang sangat singkat. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kapanewon dengan beberapa sampel pasar yang diambil.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas untuk menemukan hasil yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Sleman.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, S. (2022). *SAAT Minimarket di Kalasan Sleman Nekat Buka dalam Jarak Kurang dari 1 Km dari Pasar*. <https://jogja.tribunnews.com/2022/06/19/saat-minimarket-di-kalasan-sleman-nekat-buka-dalam-jarak-kurang-dari-1-km-dari-pasar-tradisional>

- Ariani, P., & Sumbawa, N. S. (2017). Implementation of Revitalization Policy of Nyanggelan Market in Denpasar City Government. *Vol. 9*.
- Baroroh, N. M. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Creswell. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Pustaka Pelajar.
- Danisworo. (2002). *Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota*.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.
- Mulyati, Y., & Surtiani, A. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Oleh PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung. *Vol. 1*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- Silitonga, T. S., & Mulyadi, A. W. E. (2021). Analisis Dampak Ekonomi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta). *Vol 1*.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- Sukriswanto. (2012). *Analisis Kelayakan Revitalisasi Pasar Umum Gubug Kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Zakni, M. H. (2017). *Analisis Implementasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang dan Minat Beli Konsumen Dalam Perpektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.